

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Prof. Dr. Petrus Peleng Roreng.,SE.,M.Si ACPA.,CRA.,CRP
Prof. Dr. Oktavianus Pasaloran.,SE.,M.Si.,Ak.,CA

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Prof. Dr. Petrus Peleng Roreng.,SE.,M.Si ACPA.,CRA.,CRP
Prof. Dr. Oktavianus Pasaloran.,SE.,M.Si.,Ak.,CA



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Penulis :

Prof. Dr. Petrus Peleng Roreng.,SE.,M.Si ACPA.,CRA.,CRP
Prof. Dr. Oktavianus Pasaloran.,SE.,M.Si.,Ak.,CA

ISBN : 978-634-7314-82-6

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor : Winda Rahma Wati

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Agustus 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan akuntansi publik di era modern, dengan fokus pada isu-isu strategis seperti *green accounting*, *sustainability reporting*, *environmental*, *social*, and *governance* (ESG), pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *big data*, perubahan kebijakan fiskal, serta arah perkembangan akuntansi publik di tingkat global. Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, akuntansi publik tidak lagi hanya berfokus pada pelaporan keuangan tradisional, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perkembangan teknologi informasi serta tuntutan transparansi mendorong pemerintah dan organisasi publik untuk mengadopsi sistem akuntansi yang lebih akurat, real-time, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, hadirnya teknologi seperti *blockchain* dan *big data* telah membuka peluang baru dalam peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan data keuangan negara. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami dinamika akuntansi publik masa kini dan masa depan. Penulis berupaya menyajikan materi dengan bahasa yang jelas, runtut, dan berbasis pada kajian ilmiah terkini, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus praktis. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu akuntansi publik di Indonesia maupun di kancah internasional.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
Bab 1 Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik.....	1
A. Pengertian Sektor Publik	2
B. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta	3
C. Fungsi Akuntansi Sektor Publik	4
D. Stakeholder dalam Sektor Publik	5
E. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.....	6
Bab 2 Teori Akuntansi Sektor Publik	8
A. Teori Akuntansi dan Relevansinya dalam Sektor Publik.....	9
B. Perspektif Ekonomi, Politik, dan Sosial	10
C. Teori Lembaga dalam Akuntansi Publik	11
D. Akuntabilitas dan Transparansi	12
E. Teori Legitimasi dan Kinerja Publik	13
Bab 3 Regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	15
A. Kerangka Regulasi Keuangan Publik di Indonesia	16
B. Peran BPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan	17
C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	19
D. Penerapan Basis Kas dan AkruaI	21
E. Harmonisasi Regulasi Nasional dan Internasional	22
Bab 4 Siklus Anggaran dalam Pemerintahan	25

A.	Penganggaran di Sektor Publik.....	26
B.	Proses Penyusunan APBN dan APBD.....	28
C.	Pengesahan dan Revisi Anggaran.....	29
D.	Implementasi dan Pengendalian Anggaran.....	31
E.	Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran.....	32
Bab 5	Proses Akuntansi di Pemerintah Pusat.....	35
A.	Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Pusat.....	36
B.	Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan	37
C.	Akuntansi Kas dan Akrual di Pemerintah Pusat.....	39
D.	Laporan Realisasi Anggaran.....	40
E.	Laporan Operasional dan Neraca	41
Bab 6	Proses Akuntansi di Pemerintah Daerah.....	43
A.	Struktur Keuangan Pemerintah Daerah	44
B.	Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah	45
C.	Akuntansi Aset Tetap dan Belanja Modal.....	46
D.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	47
E.	Audit oleh BPK dan Opini Audit.....	49
Bab 7	Sistem Informasi Akuntansi Publik.....	51
A.	Konsep.....	52
B.	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	53
C.	Aplikasi SIMDA dan SAKTI	54
D.	E-Budgeting dan E-Government	56
E.	Fungsi SIA Publik.....	57

Bab 8 Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja	59
A. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik	60
B. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	62
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	63
D. Evaluasi Kinerja Berbasis Anggaran	64
E. Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja	66
Bab 9 Audit dan Pemeriksaan Keuangan Publik	68
A. Tujuan dan Jenis Audit Sektor Publik	69
B. Audit Kinerja dan Audit Kepatuhan	71
C. Proses Pemeriksaan oleh BPK.....	72
D. Penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).....	74
E. Tindak Lanjut Hasil Audit	75
Bab 10 Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Publik	78
A. Konsep Akuntabilitas Publik	79
B. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara.....	81
C. Mekanisme Partisipasi Publik	83
D. Peran Media dan LSM dalam Kontrol Publik	84
E. Good Governance dan Akuntansi	86
Bab 11 Akuntansi Dana Hibah dan Bantuan Sosial	88
A. Pengertian dan Jenis Dana Hibah	89
B. Mekanisme Pencatatan Hibah	91
C. Bantuan Sosial dan Subsidi	93
D. Pertanggungjawaban Dana Hibah	95

E.	Isu dan Temuan dalam Audit Hibah	97
Bab 12	Manajemen Aset dan Akuntansi Aset Tetap	100
A.	Jenis-jenis Aset di Sektor Publik	100
B.	Inventarisasi dan Penilaian Aset	101
C.	Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap	102
D.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	103
E.	Audit Aset dan Aset Bermasalah	104
Bab 13	Akuntansi BLU dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah	105
A.	Konsep Badan Layanan Umum (BLU)	106
B.	Akuntansi BLU: Kas, Akrua, dan PSAK	107
C.	Pengelolaan Keuangan BUMN dan BUMD	108
D.	Laporan Keuangan Entitas Usaha Publik	109
E.	Evaluasi Kinerja Keuangan BLU dan BUMN	110
Bab 14	Reformasi Keuangan Publik di Indonesia	111
A.	Sejarah Reformasi Keuangan Negara	112
B.	Reformasi Penganggaran dan Akuntansi	113
C.	Penerapan SAP Berbasis Akrua	114
D.	Integrasi Sistem dan Kelembagaan	115
E.	Tahapan Reformasi Keuangan Negara	115
Bab 15	Isu Akuntansi Sektor Publik	119
A.	Green Accounting dalam Pemerintah	120
B.	Sustainability Reporting dan ESG	120

C.	Peran Teknologi Blockchain dan Big Data.....	121
D.	Perubahan Kebijakan Fiskal dan Akuntansi	122
E.	Arah Perkembangan Akuntansi Publik Global.....	122

Bab 1

Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik

Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik merujuk pada prinsip, aturan, dan praktik akuntansi yang diterapkan pada entitas pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya yang tidak berorientasi pada laba. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang fokus pada pencapaian profit, akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Akuntansi ini mencakup pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, serta lembaga nirlaba lainnya yang menggunakan dana masyarakat. Dalam penerapannya, akuntansi sektor publik mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) di Indonesia, yang mencerminkan kebutuhan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Salah satu ciri utama akuntansi sektor publik adalah orientasi anggaran yang sangat kuat, di mana proses penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sangat bergantung pada mekanisme penganggaran. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan dana publik menjadi fokus utama agar dapat mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

A. Pengertian Sektor Publik

Pengertian Sektor Publik mengacu pada bagian dari perekonomian yang dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Sektor ini mencakup institusi-institusi yang tidak berorientasi pada laba, seperti kementerian, lembaga pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah, serta organisasi nirlaba yang menerima dana publik. Fokus utama sektor publik adalah pelayanan publik, bukan penciptaan keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di sektor ini ditujukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana masyarakat. Fungsi utama sektor publik meliputi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan belanja pemerintah. Dalam konteks ini, sektor publik memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kewenangan negara, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, sektor publik semakin dituntut untuk beroperasi secara profesional dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya mendorong pemerintah untuk mengelola sektor publik dengan pendekatan manajerial yang modern, transparan, dan partisipatif. Hal ini tercermin dalam reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, efisiensi, dan integritas. Selain itu, sektor publik juga berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mendukung pembangunan infrastruktur, serta menyediakan jaminan sosial bagi kelompok

masyarakat yang rentan. Dengan demikian, keberadaan sektor publik tidak hanya menjadi instrumen kebijakan negara, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta

Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta terletak pada tujuan utama, lingkungan operasional, sumber dana, serta sistem pelaporan keuangannya. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, sedangkan akuntansi sektor swasta berorientasi pada pencapaian laba dan peningkatan nilai pemegang saham. Dalam sektor publik, entitas seperti instansi pemerintah atau lembaga nirlaba tidak mencari keuntungan, melainkan berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat secara merata dan adil. Oleh karena itu, sumber pendanaannya pun berbeda; sektor publik sebagian besar berasal dari pajak, retribusi, hibah, dan dana transfer pemerintah, sedangkan sektor swasta memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa.

Perbedaan lainnya terletak pada sistem penganggaran. Dalam sektor publik, anggaran merupakan alat utama perencanaan dan pengendalian yang sangat mengikat dan menjadi dasar dalam pencatatan transaksi. Sedangkan di sektor swasta, anggaran bersifat fleksibel sebagai alat manajemen dan evaluasi kinerja keuangan. Dari segi pelaporan, akuntansi sektor publik menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan sektor swasta menggunakan standar akuntansi keuangan seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh IAI

(Ikatan Akuntan Indonesia). Selain itu, laporan keuangan sektor publik ditujukan kepada publik dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan laporan keuangan sektor swasta lebih ditujukan kepada investor, kreditur, dan manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis.

C. Fungsi Akuntansi Sektor Publik

Fungsi akuntansi sektor publik sangat vital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Fungsi utama dari akuntansi sektor publik adalah sebagai alat pertanggungjawaban (accountability) terhadap penggunaan dana publik. Melalui sistem akuntansi yang terstruktur, pemerintah dan lembaga publik dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran serta kinerja keuangan secara menyeluruh. Selain itu, akuntansi sektor publik juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian anggaran. Data akuntansi digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran tahunan, serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Fungsi berikutnya adalah sebagai alat pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal dan kebijakan publik lainnya. Tak kalah penting, akuntansi sektor publik juga berfungsi sebagai media komunikasi keuangan antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui laporan keuangan yang disajikan secara

terbuka, publik dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan amanat pengelolaan dana rakyat secara bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berperan sebagai pilar penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.

D. Stakeholder dalam Sektor Publik

Stakeholder dalam sektor publik adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas, kinerja, dan pengelolaan sumber daya oleh entitas sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta yang fokus utamanya adalah pemegang saham dan investor, sektor publik memiliki jangkauan pemangku kepentingan yang lebih luas dan kompleks. Stakeholder utama dalam sektor publik meliputi masyarakat umum, yang berperan sebagai pemilik dana publik melalui pembayaran pajak dan memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik yang adil dan berkualitas. Kemudian, lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD juga menjadi stakeholder penting karena mereka memiliki fungsi pengawasan dan pengesahan anggaran yang diajukan oleh lembaga eksekutif.

Selain itu, lembaga eksekutif seperti kementerian, dinas, dan badan pemerintah berperan sebagai pelaksana program dan kebijakan publik yang didanai oleh APBN/APBD, sehingga mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Badan pemeriksa keuangan (BPK) juga merupakan stakeholder penting yang berfungsi untuk mengaudit dan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah, guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tidak kalah penting, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta komunitas internasional juga termasuk dalam kelompok stakeholder yang mengawasi, menilai, dan memberi masukan terhadap kebijakan serta kinerja sektor publik. Interaksi yang baik dan transparan antara entitas publik dengan para stakeholder ini menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

E. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami transformasi signifikan, terutama sejak era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Sebelumnya, sistem pengelolaan keuangan negara cenderung tertutup, birokratis, dan tidak transparan. Namun, desakan masyarakat terhadap akuntabilitas publik dan transparansi keuangan mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Tonggak penting dalam perkembangan ini adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, pemerintah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Implementasi SAP juga diikuti oleh peralihan dari sistem pencatatan berbasis kas menuju basis akrual, yang memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Perkembangan ini diperkuat dengan kehadiran

sistem informasi akuntansi pemerintahan berbasis teknologi, seperti Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), yang membantu dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Seiring waktu, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah juga tercermin dari semakin banyaknya entitas pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola dan transparansi keuangan negara. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti kualitas sumber daya manusia, konsistensi penerapan SAP, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap akuntabilitas publik. Oleh karena itu, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia harus terus didorong melalui pelatihan, penguatan regulasi, serta penerapan prinsip good governance secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A. (2004). The ethical, social and environmental reporting-performance portrayal gap. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(5), 731-757.
- Alles, M. G. (2015). Drivers of the use and facilitators and obstacles of the evolution of Big Data by the audit profession. *Accounting Horizons*, 29(2), 439-449.
- Ball, A. (2005). Environmental accounting and change in UK local government. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(3), 346-373.
- Ball, A., & Bebbington, J. (2008). Editorial: Accounting and reporting for sustainable development in public service organizations. *Public Money & Management*, 28(6), 323-326.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395-413.
- Bergmann, A., & Grossi, G. (2014). Accounting, auditing and accountability in the public sector: developments and future directions. *Financial Accountability & Management*, 30(1), 1-15.
- Brusca, I., & Grossi, G. (2012). Sustainability accounting in public sector: A structured literature review. *Public Money & Management*, 32(6), 415-424.

- Brusca, I., & Montesinos, V. (2010). Public financial management reforms: The role of IPSAS in Latin-America. *Public Administration and Development*, 30(5), 362-374.
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(7), 829-846.
- Chan, J. L. (2003). Government accounting: An assessment of theory, purposes and standards. *Public Money & Management*, 23(1), 13-20.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2010). Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*, 76(3), 537-554.
- Coyne, E., & McMickle, P. (2017). Can blockchains serve an accounting purpose? *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(2), 101-111.
- Dai, J., & Vasarhelyi, M. A. (2017). Toward blockchain-based accounting and assurance. *Journal of Information Systems*, 31(3), 5-21.
- De Villiers, C., & Maroun, W. (2018). Sustainability accounting and integrated reporting. *Routledge Handbook of Environmental Accounting*.
- Demirkan, S., & Demirkan, I. (2014). Blockchain technology in the public sector: A conceptual framework. *Journal of Accounting and Public Policy*, 33(6), 551-556.
- Ellwood, S., & Newberry, S. (2007). Public sector accrual accounting: Institutionalising neo-liberal principles?

- Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20(4), 549-573.
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability... and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47-62.
- Guthrie, J., & Farneti, F. (2008). GRI sustainability reporting by Australian public sector organizations. *Public Money & Management*, 28(6), 361-366.
- Hepworth, N. (2003). Preconditions for successful implementation of accrual accounting in central government. *Public Money & Management*, 23(1), 37-44.
- Janvrin, D. J., & Watson, M. W. (2017). —Big Data: A new twist to accounting. *Journal of Accounting Education*, 38, 3-8.
- Kaur, A., & Lodhia, S. (2018). Sustainability accounting, accountability and reporting in the public sector: An overview. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 9(4), 518-538.
- Larrinaga-González, C., & Bebbington, J. (2001). Accounting change or institutional appropriation?—A case study of the implementation of environmental accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 12(3), 269-292.
- Lodhia, S. (2015). Exploring the transition to integrated reporting through a practice lens: An Australian perspective. *Journal of Business Ethics*, 129(3), 585-598.

- Newberry, S. (2014). The use of accrual accounting in New Zealand's central government: An impact assessment. *Accounting History*, 19(4), 452-474.
- Owen, D. (2008). Chronicles of wasted time? A personal reflection on the current state of, and future prospects for, social and environmental accounting research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(2), 240-267.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2007). Are ICTs promoting government accountability? A comparative analysis of e-governance developments in 19 OECD countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(5), 583-602.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2018). Business cases and corporate engagement with sustainability: Differentiating ethical motivations. *Journal of Business Ethics*, 147(2), 241-259.
- Schick, A. (2009). Sustainable budgeting. *OECD Journal on Budgeting*, 9(1), 1-26.
- Warren, J., Moffitt, K., & Byrnes, P. (2015). How Big Data will change accounting. *Accounting Horizons*, 29(2), 397-407.
- Yermack, D. (2017). Corporate governance and blockchains. *Review of Finance*, 21(1), 7-31.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Prof. Dr. Petrus Peleng Roreng., SE., M.Si ACPA., CRA., CRP
Prof. Dr. Oktavianus Pasaloran., SE., M.Si., Ak., CA